

**PERBANDINGAN HUKUM ANTARA PENGATURAN PERLINDUNGAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA DAN DI AUSTRALIA
DIKAITKAN DENGAN *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES)***

Raden Fini Rachmarafini Rachmat
(1287052)

ABSTRAK

Indonesia dan Australia memiliki kekayaan alam yang beragam, salah satunya adalah kekayaan akan satwa-satwa endemik. Satwa-satwa endemik tersebut tergolong dalam satwa liar yang terancam punah. Satwa-satwa langka tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga sering dilakukannya tindakan perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi tersebut. Melihat maraknya perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di dunia, maka dibentuklah konvensi internasional yang disebut *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbul pertanyaan bagaimana perlindungan satwa liar dilindungi di Indonesia dan Australia dikaitkan dengan CITES serta bagaimana persamaan dan perbedaan dari pengaturan mengenai perlindungan satwa liar dilindungi di Indonesia dan Australia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa Indonesia dan Australia mengatur aturan yang lebih ketat dari apa yang diatur dalam CITES, dimana CITES masih memungkinkan adanya perdagangan satwa liar dilindungi, sedangkan Indonesia dan Australia sama sekali tidak memperbolehkannya serta diketahui bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia dan Australia memiliki banyak persamaan dalam mengatur perlindungan satwa liar dilindungi, yang berbeda adalah aturan mengenai *strict liability* dan mengenai beratnya sanksi yang dijatuhkan.

Kata-kata kunci: perlindungan, satwa liar dilindungi, perdagangan, CITES

**COMPARATIVE STUDY OF LAW BETWEEN THE REGULATION OF
WILDLIFE PROTECTION THAT IS PROTECTED IN INDONESIA AND
AUSTRALIA WHICH IS CONNECTED TO THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA
AND FLORA (CITES)**

Raden Fini Rachmarafini Rachmat
(1287052)

ABSTRACT

Indonesia and Australia have diverse natural resources one of which is endemic animals. The endemic animals belong to endangered wildlife. Rare animals are highly economic, which often cause illegal trafficking among the protected wildlife. In regard to the rampant illegal trade in protected wildlife in the world, an international convention was formed, called as the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Based on this background, a question arises regarding how is the protection of wildlife in Indonesia and Australia linked to CITES as well as how the similarities and differences of the arrangements of wildlife protection in Indonesia and Australia.

The method used in this research is a normative juridical with library-based data source. The research is descriptive analytic to describe something with words or sentences, then separated based on their categories to get the conclusion. The research approach includes legislation and comparative approach.

The research result shows that Indonesia and Australia set stricter rules compare to what is stipulated in CITES, where CITES still allows the trade of protected wildlife, while Indonesia and Australia won't allow any chance, and it is known that the laws of Indonesia and Australia have many similarities in governing the protection of wildlife. While the difference can be found in the rules of strict liability and the severity of the sanctions imposed.

Keywords: *protection, endangered species, trade, CITES*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
 BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR DILINDUNGI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Perlindungan Hukum Bagi Satwa	24
1. Hukum Indonesia yang Mengatur Perlindungan Satwa Dilindungi	25
2. Perjanjian Internasional yang Mengatur Perlindungan Satwa Liar Dilindungi	27
B. Kategori Kepunahan	29
C. Tindakan yang Dilarang dalam Rangka Melindungi Satwa Liar Dilindungi Menurut Perundang-Undangan Indonesia	35
D. Perdagangan Satwa Dilindungi	39
 BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR DILINDUNGI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI AUSTRALIA	
A. Pengaturan Perlindungan Satwa Liar Dilindungi Menurut Sistem Hukum Australia	44

B. Kategori Kepunahan Satwa Menurut Sistem Hukum Australia	45
1. Kategori Punah Menurut EPBC Act	46
2. Kategori Punah Menurut EPBC Regulation	52
3. Kategori Punah Menurut <i>Threaten Species Scientific Committee</i>	54
C. Tindakan yang Dilarang dalam Rangka Melindungi Satwa Liar Dilindungi Menurut Perundang-Undangan Australia	58
D. Perdagangan Satwa Dilindungi	71
1. Perdagangan Satwa Secara Legal dan Ilegal di Australia	71
2. Peraturan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Australia	74

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENGATIRAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR DILINDUNGI DI INDONESIA DAN AUSTRALIA DIKAITKAN DENGAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

A. Perlindungan Satwa Liar Dilindungi di Indonesia dan Australia Dikaitkan Dengan <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)	78
1. Ratifikasi dan Asesi <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) di Indonesia dan Australia terkait Perlindungan Satwa Liar Dilindungi	78
2. Penerapan Substansi Klasifikasi Satwa Liar Dilindungi yang Diatur oleh <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) di Indonesia dan Australia .	85
3. Penerapan Substansi Perdagangan yang Diatur oleh <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) di Indonesia dan Australia	87
4. Penerapan Substansi Penindakan Terhadap Pelanggaran yang Diatur oleh <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) di Indonesia dan Australia .	92
B. Perbandingan Model Pengaturan Perlindungan Satwa Liar	93
1. Perbandingan Berdasarkan Substansi Hukum	88
2. Perbandingan Berdasarkan Struktur Hukum	102
3. Perbandingan Berdasarkan Budaya Hukum	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------



DAFTAR SINGKATAN

1.	CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
2.	DEWHA	Department of Environment, Water, Heritage, and the Arts
3.	EPBC	Environment Protection and Biodiversity Conservation
4.	IUCN	The International Union for Conservation of Nature
5.	LIPI	Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Peraturan-peraturan di Indonesia dan Australia Terkait Satwa Liar yang Dilindungi 19
Tabel 3.1	Kategori Satwa Terancam Punah Menurut EPBC Act 47
Tabel 3.2	Kriteria Daftar Spesies Terancam Punah Menurut EPBC Regulations 52
Tabel 3.3	Pengurangan Jumlah Populasi 54
Tabel 3.4	Tinjauan Distribusi Geografis Penyebaran Satwa Sebagai Indikator Kepunahan 55
Tabel 3.5	Pengurangan Luas Populasi 56
Tabel 3.6	Jumlah Individu Dewasa 57
Tabel 3.7	Analisis Kuantitatif 58
Tabel 3.8	Tindakan yang Dilarang dalam Melindungi Satwa Liar Dilindungi Menurut EPBC Act 59
Tabel 3.9	Peraturan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perundang- undangan Australia 74
Tabel 4.1	Perbandingan Penggolongan Kategori Punah 94
Tabel 4.2	Perbandingan Perlindungan Terhadap Satwa Liar Dilindungi 96
Tabel 4.3	Perbandingan Perdagangan Terhadap Satwa Liar Dilindungi 99
Tabel 4.4	Perbandingan Sanksi Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi 101